



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 18 TAHUN 2025

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pembentukan dan Pembinaan serta Perpanjangan Sertifikat Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 489);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 149 TAHUN 2022 TENTANG ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 149 Tahun 2022 Tentang Asesor Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,




Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 149 TAHUN 2022
TENTANG ASESOR KOMPETENSI
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 18 TAHUN 2025

TANGGAL : 10 Februari 2025

DAFTAR NAMA ASESOR KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

No.	Nama	Instansi
1.	Ade Rizky Emirsyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2.	Adreng Kusuma Ayuningtyas	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	Agita Marelia Ulfa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4.	Aisyah Khoirun Nisa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5.	Anatasia	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Andy Martanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7.	Andy Purwa Sejati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
8.	Anita Carrollin	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9.	Ari Sulindra	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Nama	Instansi
10.	Arif Budiman	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
11.	Arif Rachman	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12.	Deasy Rachmawati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
13.	Dian Rahmayanti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
14.	Dwi Wahyuni Kartianingsih	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
15.	Eben Henry Reagen	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
16.	Edi Kristiyanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
17.	Eva Nurdinna Agustini	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
18.	Firmansyah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
19.	Frama Nugraha	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
20.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21.	Heldi Yudiyatna	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
22.	Hendro Kuswanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
23.	Hermawan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
24.	I Nyoman Aditya Wicaksana	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
25.	Ikkal Amaludin	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
26.	Ilvia Restu Utami	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Nama	Instansi
27.	Iwan Herniwan	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
28.	Jochanan Setyo Adhi Nugroho	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29.	Kartika Fitriyani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
30.	Ketsia Aprilianny Laya	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
31.	Linda Mikowati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
32.	Linggar Lailatussa'adah Inhardy	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
33.	Lutfi Prafidya Ferisa	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
34.	Martdetiara Dewi Kartika	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
35.	Miftah Irfaniah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
36.	Nicke Kusuma Devi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
37.	Nungky Karina Putri	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
38.	Octo Army	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
39.	Raden Ari Widiyanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
40.	Rinaldi Morintosh	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
41.	Rini Handriyani	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
42.	Rizky Arimawati	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
43.	Rovazio Okiiza	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

No.	Nama	Instansi
44.	Satriyo Wibowo	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
45.	Siti Ulyanah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
46.	Suharti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
47.	Sulmiari	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
48.	Tri Angga Putra Pamungkas	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
49.	Tri Susanto	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
50.	Umi Nurnaeni	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
51.	Vina Da'watul Aropah	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
52.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
53.	Windy Dian Trisari	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
54.	Yuyu Yulianti	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
55.	Zulhenny	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
56.	Abdul Farid Hasan	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
57.	Ade Kristianto	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
58.	Akhmad Khulaemi	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
59.	Aldy Turman	Individu
60.	Anastasia Citra Puspita	Ombudsman Republik Indonesia
61.	Angga Widita Amirul	Pemerintah Kota Salatiga
62.	Arabinaya Leomin Lumbu Lamba	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
63.	Ari Puspitasari	Pemerintah Kota Kediri

No.	Nama	Instansi
64.	Arinnandi	Kementerian Imigrasi dan Permasalahan Masyarakat
65.	Ati Kuswati	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
66.	Billy Thandy Tulungen	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
67.	Budi Sukiswo	Pemerintah Kabupaten Sleman
68.	Cecep Fauzy Chaidir	Individu
69.	Davli	Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
70.	Denny Wijaya Permana	Kementerian Kelautan dan Perikanan
71.	Doddy Eka Sukardi Putra	Pemerintah Kabupaten Banyumas
72.	Edi Tamtomo	Badan Pemeriksa Keuangan
73.	Eko Hariyanto	Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
74.	Eko Suryo Putranto	Pemerintah Kabupaten Cirebon
75.	Fajar Adi Hemawan	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
76.	Handoyo Nugroho	Pemerintah Kota Surakarta
77.	Hendra Hadi	Kementerian Agama
78.	Hendriansyah	Kementerian Kesehatan
79.	Hernaning Rangga Dhyta Utama	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
80.	Hernik Jatmiati	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
81.	Hery Novriansyah	Pemerintah Kabupaten Tapin
82.	Hestri Rokayah	Pemerintah Kota Cimahi
83.	Ika Kurnia Mustika	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
84.	Irawaty Imran	Individu
85.	Isriadi Putranto	Pemerintah Kabupaten Karanganyar
86.	Kadek Agus Putra Sastrawan	Pemerintah Provinsi Bali
87.	Kresna Makkulawu	Pemerintah Kota Tarakan

No.	Nama	Instansi
88.	Kusriyadi	Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan
89.	Kusyanto	Pemerintah Kabupaten Pematang
90.	Lili Hojali	Pemerintah Provinsi Banten
91.	Lusningsih	Pemerintah Kota Yogyakarta
92.	M Syarif	Pemerintah Kabupaten Soppeng
93.	Meilia Witri Budi Utami	Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan
94.	Mita Astari Yatnanti	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta
95.	Moh. Naim	Kementerian Agama
96.	Mohammad Fachrizal Herlambang	Kementerian Kelautan dan Perikanan
97.	Muh. Saefudin Mahmud	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
98.	Muhammad Adiwibowo Soedarmo	Kementerian Kesehatan
99.	Muhammad Firdaus	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
100.	Muhammad Winarno	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
101.	Nunu Nurdiana	Politeknik Negeri Padang
102.	Nur Basuki	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
103.	Rahfan Mokoginta	Pemerintah Kota Kotamobagu
104.	Rahmad	Pemerintah Kota Yogyakarta
105.	Rakhma Kusuma Wardhani	Pemerintah Kota Yogyakarta
106.	Raymon Budi Hermanto	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
107.	Risal	Pemerintah Kabupaten Kolaka
108.	Risman Iriyanto Djafar	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
109.	Sagung Intan Widyarie	Pemerintah Kabupaten Badung
110.	Saifudin Zuhri	Pemerintah Kabupaten Tulungagung
111.	Sanusi Burhanudin	Pemerintah Kabupaten Gresik
112.	Selamet Budiharto	Individu

No.	Nama	Instansi
113.	Suhar Simbolon	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
114.	Suherman	Pemerintah Provinsi Banten
115.	Sukri	Pemerintah Kabupaten Maros
116.	Sulono	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
117.	Suroso	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
118.	Suryamiharja	Pemerintah Provinsi Papua Barat
119.	Suwarno	Pemerintah Kota Madiun
120.	Syamsir Rahman	Pemerintah Kabupaten Tabalong
121.	Tri Wahyu Widodo	Badan Riset dan Inovasi Nasional
122.	Vidi Januardani	Kementerian Kelautan dan Perikanan
123.	Yasip Khasani	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI